

# DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022)

Reni Dwi Apriani<sup>1</sup>, Supami Wahyu Setiyowati<sup>2</sup>, Mochamad Fariz Irianto<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Email: [reniapriani2042@gmail.com](mailto:reniapriani2042@gmail.com)<sup>1</sup>, [setiyo@unikama.ac.id](mailto:setiyo@unikama.ac.id),

[mochamadfarizirianto@unikama.ac.id](mailto:mochamadfarizirianto@unikama.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>\*2</sup>*Corresponding Author*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur selama periode tahun 2020-2022. Metode yang digunakan adalah analisis data panel yang melibatkan data dari beberapa Pemda di Jawa Timur selama periode tersebut. Data yang digunakan mencakup belanja modal, pendapatan asli daerah, serta indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal sendiri belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini disebabkan berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal pemda tersebut. Selain itu, pendapatan asli daerah yang stabil dan diversifikasi juga berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Pemda di Jawa Timur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja modal, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui strategi diversifikasi dan peningkatan pungutan pajak, serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of capital expenditure and local revenue on the financial performance of local governments in East Java during the 2020-2022 period. The method used is panel data analysis involving data from several local governments in East Java during the period. The data used includes capital expenditure, local own-source revenue, and local government financial performance indicators, namely the ratio of regional financial independence. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that capital expenditure and local revenue have a significant influence on local government financial performance. Capital expenditure itself has not had a significant impact on the financial performance of local governments, this is due to various factors both internally and externally to the local government. In addition, stable and diversified own-source revenues also contribute to better financial performance, reducing dependence on central transfers and increasing the capacity of local governments to finance development programmes. This study provides recommendations for local governments in East Java to improve the efficiency and effectiveness of capital expenditure, optimise the potential of local revenue through diversification strategies and increase tax collection, and strengthen transparent and accountable financial governance. Thus, it is

expected that local government financial performance can be more optimal in supporting the development and welfare of the people in East Java.

**Keywords:** *Capital Expenditure, Financial Performance, Local Revenue*

Naskah diterima:22-01-2024, Naskah direvisi:30-04-2024, Naskah dipublikasikan:30-04-2024

## PENDAHULUAN

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, paradigma pengelolaan keuangan daerah telah berubah secara signifikan. Otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004. Secara keseluruhan, kedua undang-undang ini memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan potensi mereka, termasuk sumber daya manusia, dana, dan aset lain yang merupakan kekayaan lokal (Al-lintang & Hidayah, 2023). Otoritas daerah, mengharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Menurut data dari laman [djp.kemenkeu.co.id](http://djp.kemenkeu.co.id) pada tanggal 19 Juni 2022, APBN Jawa Timur menunjukkan surplus sebesar Rp61.651,74 miliar. Kinerja belanja nasional di Jawa Timur masih belum optimal menjelang akhir Triwulan II 2022, meskipun realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBPN mencapai Rp110.714,97 miliar atau 49,35 persen dari total target. Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) baru terealisasi sebesar Rp16.564,03 miliar, yang merupakan 38,06 persen dari Rp43.518,29 miliar APBN yang dialokasikan untuk Jawa Timur. Sangat penting untuk dicatat bahwa kinerja Belanja Bantuan Sosial di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, dengan dana yang disalurkan sebesar Rp42,39 Miliar, atau 46,74 persen dari pagu alokasi. Sementara itu, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar Rp32.499,21 Miliar atau 43,31 persen dari pagu alokasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan inisiatif yang akan memberikan dampak berganda yang optimal pada perekonomian Jawa Timur sesuai dengan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) (Sumber: [djp.kemenkeu.co.id](http://djp.kemenkeu.co.id))

Kinerja adalah hasil dari pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi. Evaluasi kinerja keuangan mencakup menilai seberapa baik pencapaian kinerja yang terjadi selama periode waktu tertentu sesuai dengan rencana yang telah dibuat (Mauludin & Dewi, 2020). Akibatnya, kita dapat mengetahui apakah keputusan yang dibuat dilakukan dengan benar dan objektif (Ishak et al., 2021). Pada dasarnya, analisis kinerja keuangan digunakan untuk memutar kinerja masa lalu melalui berbagai analisis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan posisi entitas keuangan yang mencerminkan kondisi saat ini dan potensi kinerjanya yang akan terus berkembang (Kurniawati & Busaini, 2017). Anggaran memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan karena merupakan dasar dari operasi pemerintahan. Anggaran adalah alat penting untuk stabilisasi dan alokasi sumber daya, perencanaan dan pengawasan organisasi, dan penilaian kinerja (Al-lintang & Hidayah, 2023)). Penggunaan indikator keuangan adalah bagian dari pengukuran kinerja keuangan. Pada dasarnya evaluasi kinerja keuangan dilakukan untuk mencapai pencapaian kinerja sebelumnya melalui berbagai analisis, sehingga dapat diperoleh posisi keuangan yang mencerminkan kondisi saat ini entitas dan potensi kinerja yang terus berkembang (Fernandes & Putri, 2022).

Pajak lokal, retribusi, dan sumber yang sah lainnya dari PAD adalah beberapa sumber pendapatan daerah. Komponen-komponen ini sangat penting bagi pemerintah daerah karena dialokasikan untuk berbagai program yang dirancang oleh pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Hendawati et al., 2018). Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting, dan berkontribusi secara signifikan terhadap Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana secara proporsional,

adil, demokratis, transparan, dan efektif. Sistem ini dirancang untuk membantu pendanaan penyelenggaraan desentralisasi (Henny A. Manafe et al., 2023). Salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus ditangani oleh pemerintah adalah bantuan sosial, yang merupakan komponen lain yang dapat mempengaruhi kinerja. Variabel pengeluaran untuk bantuan sosial dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana bantuan tersebut memenuhi kebutuhan nyata masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, variabel ini menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Arsallya et al., 2021).

Tingkat belanja modal (BM) yang tinggi menunjukkan bahwa fasilitas dan infrastruktur sedang dalam proses pembangunan. Layanan masyarakat umumnya mendapat manfaat dari perbaikan pembangunan, yang dapat berdampak positif pada kinerja daerah (Marpaung et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ketika modal belanja meningkat, kemampuan untuk menilai kinerja keuangan meningkat (Pangestu, 2023) Tingkat kualitas yang sesuai dengan harapan, hasil yang memadai sesuai kebutuhan, dan tepat waktu yang telah ditetapkan menentukan keberhasilan setiap kegiatan belanja modal. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum (Atmoko & Khairudin, n.d, 2022). Kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sangat jelas bahwa PAD membantu kemajuan daerah karena semakin besar kontribusinya terhadap APBD, semakin sedikit ketergantungan pada sumber pendapatan lainnya. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa bebas daerah dapat mengelola penyelenggaraan pemerintahannya untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah diterima dengan baik (Elsivera & Abdillah, 2017). Peningkatan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri, dan sebaliknya (Maulina et al., 2021).

Menurut perkiraan, total pendapatan Kota Malang mencapai 601 miliar, sekitar 501 miliar berasal dari pajak daerah. Terlepas dari itu, Sutaji mengakui bahwa tingkat pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang sangat bergantung pada transferan dari pemerintah pusat. Hal ini terutama berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang mencapai 2,2 triliun. Akibatnya, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kapasitas fiskalnya untuk menjadi lebih mandiri dengan terus berusaha meningkatkan penerimaan PAD. Adanya kontribusi PAD yang besar, pemerintah Kota Malang dapat menggunakan APBD dengan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan langsung daerah seperti memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan mendukung pembangunan infrastruktur (Sumber: [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), 2019)

Berdasarkan RAPBN 2019, Dana Desa (TKDD) mencapai Rp573,7 miliar, naik sebesar 9% dari perkiraan realisasinya pada 45,1% dari tahun 2014. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Daya Alam (DBH), dan Dana Otoritas Khusus adalah tiga jenis dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pusat. Namun, kenyataannya menunjukkan keadaan yang berbeda. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%, sementara Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD hanya 80,1%. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung bersikap pasif dalam memanfaatkan potensi PAD mereka (Sumber: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), 2019).

Jawa Timur mengalami fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data yang dirilis di laman [simreg.bappenas](http://simreg.bappenas), pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 3,56%, lebih rendah daripada Jawa Barat yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74%. Indeks pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih jauh dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 dan triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, mencapai 4,86%. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebelumnya sudah mencapai target pada tahun sebelumnya. (Sumber: <https://simreg.bappenas.go.id/>)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2023), (Maulina et al., 2021), (Sari & Mustanda, 2019), dan (Kuntari et al., 2019) bahwa tingkat belanja modal (BM) yang tinggi menunjukkan bagaimana sarana dan infrastruktur dibangun, dan pada umumnya, tingkat pembangunan yang tinggi akan menghasilkan peningkatan pelayanan yang diterima oleh

masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja daerah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semakin banyak belanja modal, semakin baik kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan apakah kemampuan suatu hal. Menurut (Mauludin & Dewi, 2020) Rasio pembelanjaan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengelola kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih mampu membiayai pembangunannya sendiri, dan sebaliknya (Aspan et al., 2016). Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan diindikasikan terdapatnya research gap, yang menarik untuk diteliti kembali mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur tahun 2020-2022 yang belum pernah diuji oleh para peneliti-peneliti sebelumnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, pemilihan Pemerintah Daerah (Pemda) Se-Jawa Timur sebagai objek penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikaji berdasarkan beberapa pertimbangan strategis. Jawa Timur diidentifikasi sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia. Data dari laman [simreg.bappenas](http://simreg.bappenas.go.id) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 3,56%, lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat yang mencapai 3,74%. Indeks pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 dan triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, mencapai 4,86%. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebelumnya sudah mencapai target pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, penelitian di Jawa Timur perlu difokuskan pada kajian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ekonomi dan keuangan di wilayah ini. Dengan demikian, diharapkan Jawa Timur dapat melakukan perbaikan guna mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Keberagaman sumber daya alam dan manusia di Jawa Timur menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai provinsi dengan tingkat otonomi daerah yang tinggi, Jawa Timur juga memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lokal dan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya finansialnya.

Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel seperti belanja modal dan pendapatan asli daerah mempengaruhi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur secara khusus. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah yang dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teri Agensi (Agency Theory)**

Sebuah kontrak dalam hubungan keagenan melibatkan dua pihak: prinsipal atau agen. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dalam hal kinerja keuangan daerah, melakukan pengawasan, evaluasi, dan kritik terhadap bagaimana pemerintah daerah melakukan tugasnya. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah baik, mereka juga dapat menggunakan sumber daya keuangan asli mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, daerah-daerah tersebut tidak akan bergantung pada dukungan pemerintah sepenuhnya (Agustianti & Verawaty, 2020).

### **Kinerja Keuangan**

Operasi, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah, dapat dipengaruhi oleh belanja, penerimaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kondisi makroekonomi. Ini sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Tiara, 2016). Kinerja keuangan suatu daerah dapat dievaluasi

untuk menentukan kemampuannya dalam menerapkan otonomi daerah. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan pemerintah. Contohnya termasuk tingkat independensi, ketergantungan, rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan (Al-lintang & Hidayah, 2023). Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan seseorang. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan, yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah, juga dikenal sebagai otonomi fiskal, dihitung berdasarkan data keuangan daerah, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Metode ini memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah untuk membayar sendiri berbagai fungsi pemerintah. Penghitungan rasio kemandirian membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan dan Pinjaman dari Pemerintah Pusat atau Provinsi (Mauludin & Dewi, 2020). Pada penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

**Rasio kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) = Pendapatan asli daerah /bantuan pemerintah pusat x 100%**

### **Belanja Modal**

Belanja Modal merujuk pada pengeluaran pemerintah daerah yang melebihi batas anggaran tahunan dan tujuannya adalah untuk memperkuat aset atau kekayaan pemerintah daerah. Ini biasanya melibatkan investasi dalam proyek infrastruktur umum, proyek pembangunan, dan pembelian peralatan dan barang inventaris. Tujuan utama dari belanja modal adalah untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan (Atmoko & Khairudin, n.d., 2022). Belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan, dapat dipengaruhi oleh modal belanja. Belanja modal mencakup anggaran untuk membeli aset tetap, seperti infrastruktur, peralatan, dan harta tetap lainnya selama proses perolehan modal. Aset tetap ini mencakup tanah, konstruksi, peralatan, dan aset tak berwujud (Hendawati et al., 2018). Belanja modal dihitung dengan rumus:

**BM (Belanja Modal) = Belanja tanah+belanja perlatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan irigasi dan jaringan + belanja aset tetap lainnya.**

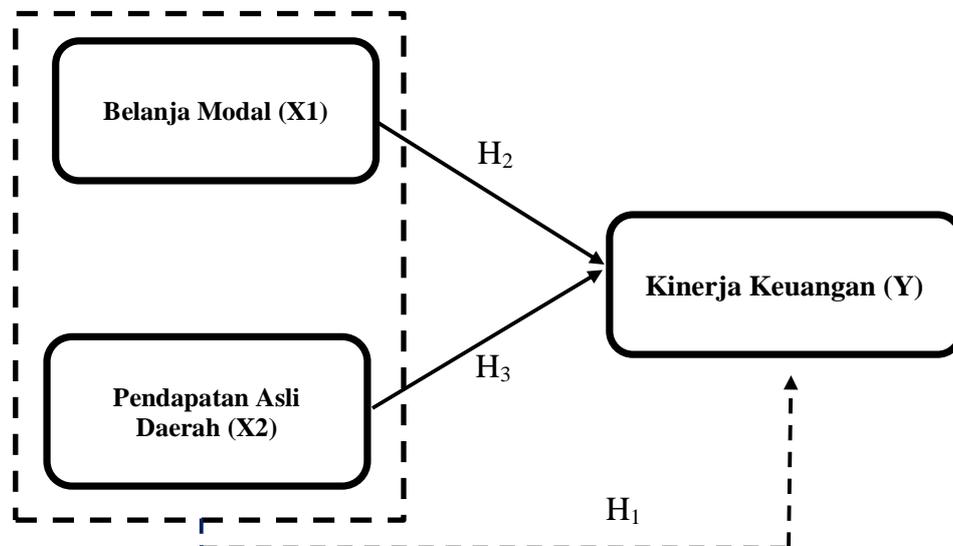
### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kesetaraan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kedua undang-undang tersebut mendefinisikan PAD dengan cara yang sama (Thalib & Ekaningias, 2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai komponen penting dalam pendapatan bruto daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, bea masuk, hasil pengelolaan aset perseorangan dan unsur hukum lainnya (Siregar, 2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai komponen penting dalam pendapatan bruto daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, bea masuk, hasil pengelolaan aset perseorangan dan unsur hukum lainnya (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

**PAD (Pendapatan Asli Daerah) = Pajak daerah + retribusi daerah +hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan +lain-lain PAD yang sah**

### Kerangka Berpikir

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan, maka dapat diilustrasikan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Kerangka Konseptual

Keterangan :  
—————→ : Pengaruh secara parsial  
- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian yang telah dilakukan maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik penelitian eksplanatori ini adalah jenis penelitian yang menguji hipotesis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian. Diuji variabel independen X1 dan X2 belanja modal dan pendapatan asli daerah serta variabel dependen Y kinerja keuangan (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yang disiapkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi pemerintah daerah di Jawa Timur dan dapat diakses melalui [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) khususnya Laporan Pencapaian APBD periode 2020-2022. Data ini mencakup informasi terkait anggaran belanja modal dan pendapatan asli daerah (PAD).

Populasi dapat merujuk pada semua hal, seperti hal-hal, peristiwa, atau individu yang memiliki karakteristik yang sama dan menarik perhatian seorang peneliti (Ingrid Tiara & Fajri Ananda, n.d.). Terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia, menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari tahun 2018 hingga 2022. Studi kasus ini akan fokus pada pemerintah daerah (Pemda) di Jawa

Timur. Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dari segi administratif, jadi populasi penelitian ini mencakup seluruh 38 pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sejumlah sampel dari suatu populasi untuk memilih sebagian dari populasi yang potensial (Syam et al., 2018). Dalam penelitian ini, setiap anggota populasi diambil sebagai sampel. Ini penting karena penelitian ini melibatkan subkelompok populasi yang kecil, atau karena tujuannya adalah membuat generalisasi dari populasi dengan tingkat kesalahan yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai penelitian populasi. Sampel dipilih sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah penelitian. Sebanyak 114 sampel dipilih berdasarkan kriteria 38 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2020–2022. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (BM), Kinerja Keuangan (KK), dan Pendapatan Asli Daerah.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setiap anggota populasi dianggap sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Hal ini penting karena penelitian mencakup sebagian kecil populasi atau tujuannya adalah untuk melakukan generalisasi dari populasi dengan margin kesalahan yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai penelitian populasi. Sampel dipilih berdasarkan kriteria untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan pertanyaan penelitian. Sebanyak 114 sampel dipilih berdasarkan kriteria 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2022. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi belanja modal (BM), kinerja keuangan (KK), dan pendapatan asli daerah (PAD). Laporan realisasi APBD dan TKDD diperoleh dari data portal SIKD dan website keuangan pemerintah daerah ([www.djpk.depkeu.go](http://www.djpk.depkeu.go)).

Uji asumsi klasik dan heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, alat analisis regresi berganda digunakan untuk menguji uji t dan F. Dengan menggunakan SPSS Versi 23, analisis regresi berganda digunakan untuk melihat bagaimana satu variabel dependen, atau variabel terikat, berhubungan dengan dua atau lebih variabel bebas, atau variabel independen. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen pada variasi variabel dependen. Uji t dan F digunakan untuk membuat model regresi berganda (Sriwinarti & Artaningtyas, 2021). Model ini dapat berbentuk seperti ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$$

di mana:

- $Y$  = variabel dependen.
- $\beta_0$  = intercept.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_k$  = koefisien regresi untuk setiap variabel independen.
- $X_1, X_2, X_k$  = variabel independen.
- $\epsilon$  = kesalahan acak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang bernilai antara nol dan satu, menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut tabel 1, nilai R Square adalah 0,733 atau 7,3%, yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam model ini dapat menyumbang 73% dari variasi variabel dependen. Nilai R Square yang diatur ( $R^2$ ) adalah 0,729 atau 7,2%, yang menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini juga mempengaruhi hasil.

**Tabel 1.** Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

R	0,856
R Square	0,733
Adjusted R Square	0,729

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Nilai F (uji statistik simultan) sebesar 152,75 dengan nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$ , seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.** Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	50875.129	2	25437.564	152.754	.000 <sup>b</sup>
Residual	18484.414	111	166.526		
Total	69359.542	113			

**Sumber:** Hasil Olah Data, 2024

### Uji Parsial (Uji T)

Pada dasarnya, tujuan dari uji statistik t adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Hipotesis diuji dengan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) atau tingkat keyakinan 0,95. Untuk mengetahui signifikan masing-masing variabel, uji t dilakukan.

**Tabel 3.** Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.431	6.103		1.217	.226
BM	-.040	.039	-.053	-1.031	.305
PAD	.962	.057	.872	16.854	.000

**Sumber:** Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil uji t dan melalui mempertimbangkan nilai koefisien signifikansi pada tabel 3, bisa disimpulkan bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah; sebaliknya, PAD berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 4.** Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis	Hasil
Hipotesis 1	Diterima
Hipotesis 2	Ditolak
Hipotesis 3	Diterima

**Sumber:** Hasil Olah Data, 2024

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak jika dilihat pada tabel 4. bahwa belanja modal memiliki nilai Sig. 0,305 dan nilai thitung sebesar -1,031 oleh karena itu nilai signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,305 > 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis kedua  $H_2$  ditolak. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, jika dilihat pada tabel 4 bahwa PAD memiliki nilai Sig. 0,000 dan thitung sebesar 16,854 oleh karena itu nilai signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pertama  $H_3$  diterima.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

### **H1: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur secara bersamaan. Pada tabel, nilai signifikansi 0,000 menunjukkan pengaruh bersama-sama dari variabel X terhadap variabel Y, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan pengaruh bersama-sama dari variabel X terhadap variabel Y.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2023), (Maulina et al., 2021), (Sari & Mustanda, 2019), dan (Kuntari et al., 2019) bahwa tingkat belanja modal (BM) yang tinggi menunjukkan bagaimana sarana dan infrastruktur dibangun, dan pada umumnya, tingkat pembangunan yang tinggi akan menghasilkan peningkatan pelayanan yang diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja daerah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semakin banyak belanja modal, semakin baik kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan apakah kemampuan suatu hal. Menurut (Mauludin & Dewi, 2020) Rasio pembelanjaan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengelola kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih mampu membiayai pembangunannya sendiri, dan sebaliknya (Aspan et al., 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diterima.

### **H2: Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Hasil temuan menunjukkan nilai signifikansi variabel investasi (X1) pada tabel sebesar 0,305 menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasilnya, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah Jawa Timur menunjukkan bahwa belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, tingkat investasi suatu daerah tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atmoko & Khairudin, n.d., 2022), yang menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh faktor belanja modal. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2023), (SRIWIJAYANTI & APRIYANTI, 2020) dan (Maulina et al., 2021), Tingkat belanja modal (BM) yang tinggi adalah hasil dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Secara keseluruhan, peningkatan tingkat pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat, yang akan berdampak positif pada kinerja daerah (Lathifa, 2019) Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua bahwa faktor belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak.

### **H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Pendapatan asli daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada tabel, nilai valid variabel pendapatan asli daerah (X2) adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa nilai valid kurang dari 0,05.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan ini (Program et al., 2019), (Sriwinarti & Artaningtyas, 2021) dan (Widya Rahayu et al., 2023) Para peneliti sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh (SA'ADAH, 2019) menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan apakah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan lebih banyak

atau lebih sedikit Akibatnya, semakin banyak PAD yang diberikan kepada APBD, semakin sedikit ketergantungan pemerintah daerah pada uang dari pemerintah pusat. Peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah juga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Permatasari & Trisnaningih, 2022).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Studi kasus yang dilakukan pada pemda di Jawa Timur dari tahun 2020–2022 digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur secara bersamaan, atau keduanya. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur karena jumlah investasi yang dilakukan daerah tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

### **Saran**

Berdasarkan temuan ini, penulis dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan atau menggunakan variabel tambahan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu ketersediaan beberapa data yang memiliki batasan untuk diakses serta kejelasan koposisi atau sumber dari dana-dana seperti belanja modal, peneliti diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian hingga melampaui jangka waktu yang terbatas. Untuk Instansi: Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang terkait.

## **REFERENSI**

- Agustiandi, S., & Verawaty, V. (2020). ANALISIS DETERMINAN VOLUNTARY GRAPHICS DISCLOSURE PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA. *AKUNTABILITAS*, 14(1). <https://doi.org/10.29259/ja.v14i1.10588>
- Al-lintangi, R. M., & Hidayah, R. (2023). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE-JAWA TENGAH PERIODE 2019-2022. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SNPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO*, 5(1), 214–224.
- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(5), 95–106.
- Aspan, H., Khaddafi, M., & Lestari, I. (2016). The Effect of Local Taxes, Local Levies, General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) to the Government Capital Expenditures of Banda Aceh City. *Prosiding International Conference on Economics, Education Business and Accounting (ICEEBA)*, 513–526.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, D. (n.d.). *Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Elsivera, E., & Abdillah, W. (2017). Mediating Effect of Capital Expenditure on the Effect of Revenues, Allocation Fund, and Tax/Nontax Sharing on Economic Growth (Empirical Study of Regencies in Bengkulu Province Period of 2009-2015). *AFEBI Management and Business Review*, 2(2), 43–58.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA 19

- KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2018). The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence in Bandung City Government. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 1(2), 141–149.
- Henny A. Manafe, Simon Sia Niha, & Dewa Putu S. Putra. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547.
- Inggrid Tiara, F., & Fajri Ananda, C. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR*.
- Ishak, J. F., Sudradjat, S., & Mai, M. U. (2021). The Financial Performance of Regional Government on Capital Expenditure. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 11–17.
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1–13.
- Kurniawati, S., & Busaini, H. (2017). Determinants of financial performance: study of local governments in West Nusa Tenggara. *E-PROCEEDING STIE MANDALA*.
- Lathifa, H. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marpaung, O. E., Maipita, I., & Rahmadana, M. F. (2017). The Effect of Regional Generated Revenues and General Allocation Fund to Capital Expenditure and the Impact on Economic Growth in North Sumatera Province. *2nd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2017)*, 256–261.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Program, A. A., Akuntansi, S. M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017*. 4(3).
- SA'ADAH. (2019). *PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>
- SRIWIJAYANTI, H., & APRIYANTI, N. (2020). ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE, CAPITAL EXPENDITURE, AND INTERGOVERNMENTAL REVENUE ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 188–202.
- Sriwinarti, A., & Artaningtyas, W. D. (2021). The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Governments in the Special Region of Yogyakarta in 2010-2019. *RSF Conf. Ser. Business, Manag. Soc. Sci*, 1(3), 157–165.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) / penulis, Prof. Dr. Sugiyono* (4th ed., Vol. 24). Bandung : Alfabeta 2019.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39.
- Tiara, F. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Widya Rahayu, Y., Ridho Nugroho, T., & Fitri Isnaini, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 144–157. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2000>